

BAB 1

PENDAHULUAN

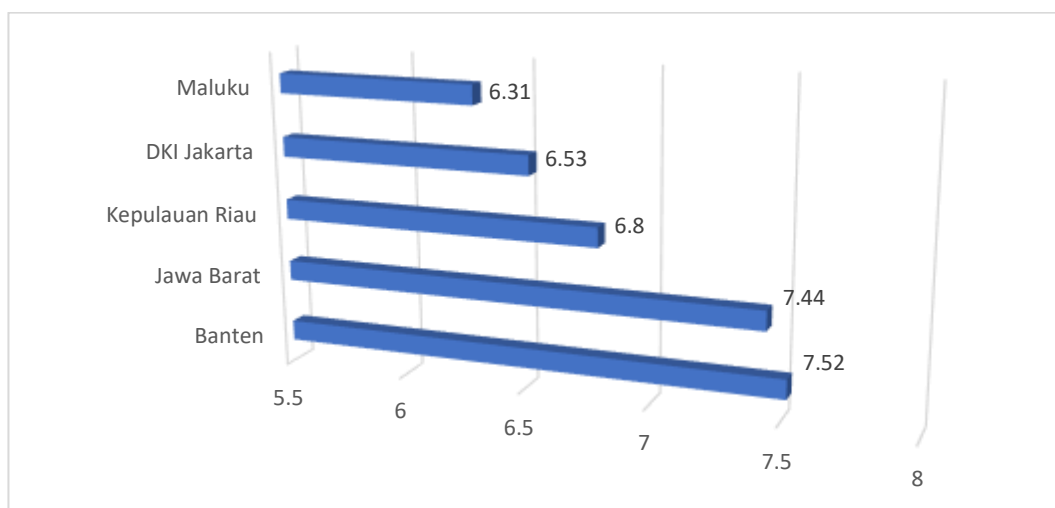
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan struktural yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Proses pembangunan bersifat multidimensi, sehingga banyak tantangan permasalahan dalam mencapai sasaran pembangunan. Keadaan seperti ini dapat ditemui di negara yang masih terbelakang, negara-negara yang sedang berkembang, dan juga pada negara maju dengan permasalahan yang berbeda-beda (Ngaisah, 2023). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, memiliki beragam persoalan yang dialami, salah satunya ialah tingginya taraf pengangguran yang ada di negara ini. Pengangguran di Indonesia mencapai angka di atas 5% setiap tahunnya (Ardian et al., 2022).

Pengangguran juga merupakan permasalahan kompleks yang berdampak terhadap aspek ekonomi dan sosial suatu negara. Pengangguran tidak hanya mengakibatkan hilangnya potensi produksi barang dan jasa secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan penderitaan dan kesulitan finansial bagi individu yang mengalaminya. Sekalipun kerugian ekonomi akibat pengangguran bisa dihitung dengan angka, dampak mental dan kemanusiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang menganggur tidak mudah diukur dengan angka-angka tersebut (Muhammad Baihawafi & Asnita Frida Sebayang 2023). Dalam upaya memahami dinamika pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom telah mengembangkan berbagai teori dan hukum ekonomi, salah satunya adalah Hukum Okun (Okun's

Law) yang dikemukakan oleh Arthur Okun (1929-1979). Sebagai salah satu pembuat kebijakan paling kreatif pada era pasca perang, Okun menemukan hubungan numerik antara output dan pengangguran, di mana setiap penurunan 2 persen *Gross National Product* dari potensinya akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 persen (Astuti, 2016). Hubungan positif antara penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan output riil ini (Yustie, 2017) menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia, terutama ketika melihat persentase tingkat pengangguran pada tahun 2023 yang menunjukkan variasi distribusi di berbagai provinsi.

Adapun persentase tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2023, memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi pengangguran di beberapa provinsi.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

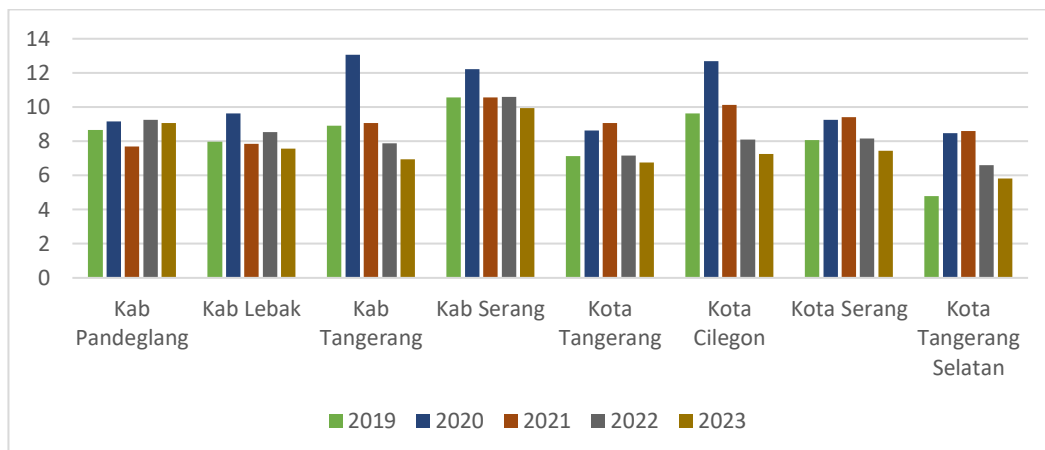
Gambar 1. 1 Rata-Rata Tingkat Pengangguran di Indonesia (%) Tahun 2023

Menurut data dari BPS per Agustus 2023, Provinsi Banten di peringkat pertama dengan tingkat pengangguran 7,52 persen dan Jawa Barat yang mencapai

7,44 persen, Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat ketiga, yaitu sebesar 6,80 persen dilanjut oleh DKI Jakarta 6,53 persen dan Maluku 6,31 persen. Oleh karena itu, Banten menjadikan salah satu provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Meskipun demikian, hal ini merupakan permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah Provinsi Banten. Padahal Provinsi Banten sendiri punya potensi sebagai tempat para investor untuk berinvestasi karena memiliki wilayah yang letak geografis yang strategis sebagai pintu gerbang menuju pasar lokal dan internasional. Di Provinsi Banten sendiri setidaknya terdapat 20 kawasan industri yang masih sangat aktif menjadi pusat produksi barang dan jasa (CNNIndonesia.com, 2021).

Provinsi Banten memiliki luas wilayah sebesar 8.651,20 km² yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten yang memiliki jumlah masing-masing 4 Kabupaten dan 4 Kota. Yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten tersebut memiliki tingkat pengangguran terbuka yang berbeda-beda seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

Gambar 1.2 Rata- Rata Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten (%) Tahun 2019 – 2023

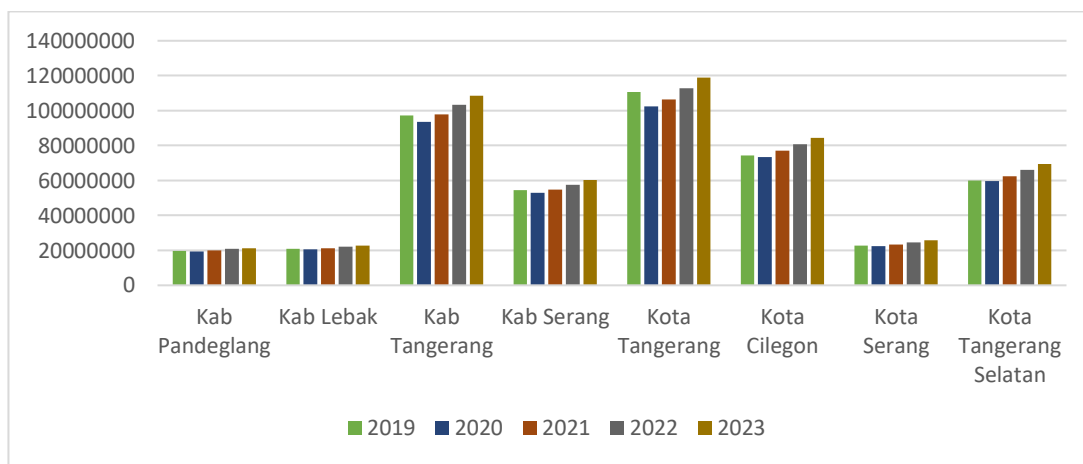
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten di 5 tahun terakhir antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi di sebagian besar kabupaten/kota. Pada tahun 2019 kabupaten Pandeglang memiliki TPT sebesar 8,67% dan mengalami peningkatan, terbukti di tahun 2023 sebesar 9,05%. Kabupaten Tangerang memiliki TPT sebesar 8,92%, yang kemudian menurun menjadi 6,94% pada tahun 2023, mencerminkan perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan. Kabupaten Lebak juga mengalami penurunan TPT dari 7,96% menjadi 7,57% dalam periode yang sama, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja. Kabupaten Serang, meskipun sempat mengalami fluktuasi, menunjukkan penurunan dari 10,58% pada tahun 2019 menjadi 9,94% pada tahun 2023. Kota Tangerang, yang sebelumnya memiliki TPT sebesar 7,14 %, mencapai 6,76% pada tahun 2023, menandakan peningkatan peluang kerja. Kota Cilegon dan Kota Serang juga menunjukkan penurunan TPT, masing-masing dari 9,64 % menjadi 7,25% dan dari 8,07% menjadi 7,45%. Sementara itu, Kota

Tangerang Selatan mencatat TPT terendah pada tahun 2019 sebesar 4,78%, yang kemudian naik menjadi 5,81% pada tahun 2023.

Menurut kajian fiskal Banten 2019 Banyaknya pengangguran di Banten hal ini terindikasi banyaknya migran masuk mencari kerja di Banten. Banyaknya Industri di Banten dan letak geografis Banten sebagai provinsi penyangga ibu kota menjadi daya tarik tersendiri bagi migran. Namun tidak diimbangi dengan keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan lowongan kerja sehingga tidak semua terserap oleh pasar kerja, serta perpindahan perusahaan ke provinsi lain karena relatif tingginya UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota). Selain itu juga disebabkan banyaknya industri di Banten banyak yang padat modal sehingga kurang menyerap tenaga kerja.

Kondisi pengangguran yang tinggi di Banten, mencerminkan tantangan struktural dalam perekonomian daerah. Dalam konteks ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai dinamika ekonomi Banten. PDRB digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila terjadi peningkatan PDRB berarti telah terjadi kenaikan produksi barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan terhadap faktor-faktor produksi salah satunya adalah naiknya permintaan tenaga kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran (Filiyasi & Setiawan, 2021). Hal ini mempengaruhi ekonomi seluruh negara. Jika orang menganggur, individu menginvestasikan lebih sedikit uang dalam bentuk barang dan jasa (untuk membeli atau membeli), akhirnya ekonomi suatu negara menurun karena

rendahnya jumlah produksi yang dihasilkan serta jumlah barang dan jasa yang dipasok ke pasar menurun. Individu yang menganggur mengkonsumsi jumlah yang jauh lebih kecil daripada individu yang bekerja, oleh karena itu tingkat pengangguran yang lebih besar dapat membuat perekonomian menjadi lebih kecil dari barang yang bisa didapatkan (Tolesa & Zeleke, 2024).



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

**Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Banten
(Juta Rupiah) Tahun 2019 -2023**

Dilihat dari gambar diatas, pada 5 tahun terakhir kabupaten Tangerang mencatat PDRB yang meningkat dari 97.129.166,45 juta Rupiah pada tahun 2019 menjadi 108.570.429,08 juta Rupiah pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di kawasan ini. Kabupaten Serang juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 54.347.487,78 juta Rupiah menjadi 60.370.564,4 juta Rupiah dalam periode yang sama. Di sisi lain, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan PDRB Lebak meningkat dari 20.810.486,83 juta Rupiah menjadi 22.706.798,37 juta Rupiah, sedangkan Pandeglang dari 19.644.125,08 juta Rupiah menjadi 21.341.090,31 juta

Rupiah. Kota Tangerang, yang merupakan pusat ekonomi, juga menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dari 110.556.398,1 juta Rupiah pada tahun 2019 menjadi 119.060.332,19 juta Rupiah pada tahun 2023. Kota Cilegon dan Kota Serang juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan Cilegon mencapai 84.537.543,85 juta Rupiah dan Serang 25.655.605,62 juta rupiah pada tahun 2023.

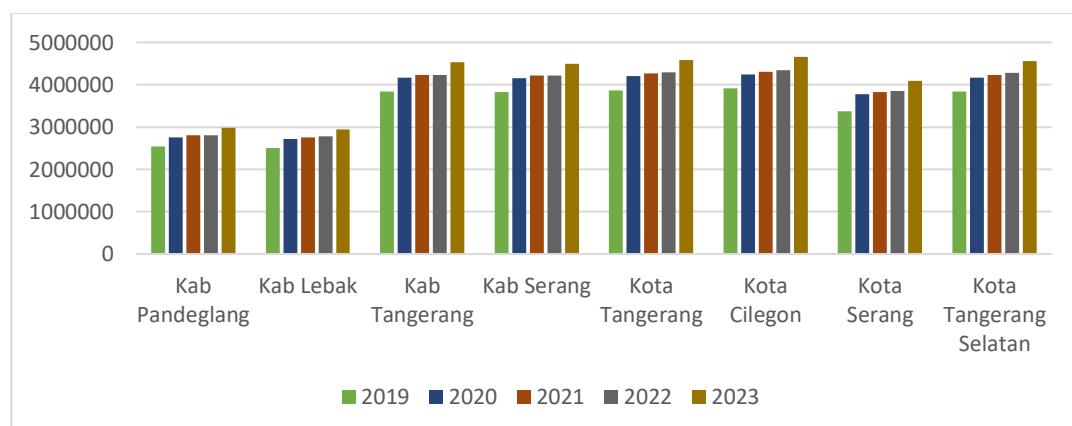
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Selama kurun waktu 2019 hingga 2023, perekonomian Provinsi Banten dan nasional mengalami fluktuasi akibat dampak pandemi COVID - 19 terhadap aktivitas masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2023 dampak pandemi COVID - 19 dapat dikatakan sudah tidak berpengaruh bagi aktivitas masyarakat di Indonesia, termasuk Banten.

Realisasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Nuzulaili, 2022). Menurut Keynes, pengangguran dapat diatasi melalui peningkatan permintaan agregat. Meningkatnya permintaan akan mendorong kinerja sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan output. Hal ini akan menyerap lebih banyak tenaga kerja, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pemikiran Keynes tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran (Zunaida & Robertus, 2022).

Upah minimum juga merupakan salah satu indikator dari adanya pengangguran terbuka. Setiap tahun pemerintah Indonesia meningkatkan upah minimum daerah yang dirasakan oleh kebijakan ini adalah pekerja dapat

meningkatkan standar hidup mereka, sehingga bermanfaat bagi pekerja. Pekerja bekerja keras untuk menerima gaji yang layak sesuai dengan kebutuhan (Ismanto, 2021). Menurut Mankiw dalam Putri Apriyanti (2023) bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran. Upah merupakan salah satu faktor yang jika dilihat dari sisi penawaran ketenagakerjaan mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Besarnya upah yang di tawarkan suatu perusahaan biasanya ditentukan oleh tingkat produktivitas, kualitas dan waktu kerja para tenaga kerja itu sendiri.

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, upah di daerah tersebut menunjukkan pertumbuhan tahunan yang konsisten. Kenaikan upah ini memberikan kontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat, yang sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Pekerja menetapkan upah minimum pada tingkat yang telah ditentukan. berikut ini adalah upah minimum kabupaten/kota di provinsi Banten tahun 2019 hingga 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

**Gambar 1.4 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Banten
(Rupiah) Tahun 2019 – 2023**

Upah Minimum di Provinsi Banten antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan di seluruh kabupaten/kota. Pada tahun 2019, Kabupaten Tangerang memiliki upah minimum tertinggi sebesar 3.841.368 Rupiah, yang terus meningkat menjadi 4.527.689 Rupiah pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tingginya biaya hidup di daerah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang juga mengalami peningkatan yang konsisten, dengan upah minimum Lebak tumbuh dari 2.498.068 Rupiah menjadi 2.944.665 Rupiah, sementara Pandeglang meningkat dari 2.542.539 Rupiah menjadi 2.980.351 Rupiah. Kota Tangerang Selatan, yang mencatat upah minimum 3.841.368 Rupiah pada tahun 2019, mencapai 4.551.452 Rupiah pada tahun 2023, menunjukkan daya tarik bagi tenaga kerja. Kota Cilegon dan Kota Serang juga menunjukkan kenaikan yang signifikan, dengan Cilegon meningkat dari 3.913.078 Rupiah menjadi 4.657.223 Rupiah dan Serang dari 3.366.512 Rupiah menjadi 4.090.799 Rupiah.

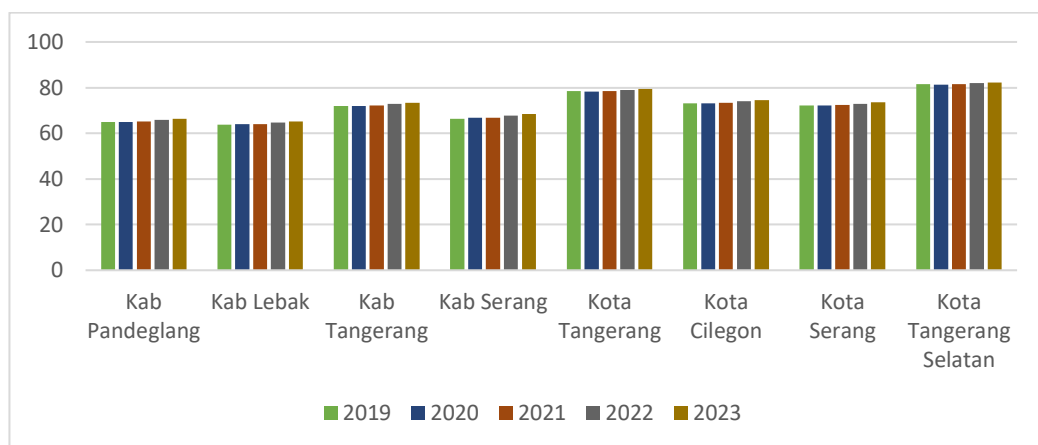
Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah adanya penetapan upah minimum (Hardianti et al., 2023). Kenaikan upah minimum bisa berpotensi meningkatkan pengangguran khususnya bagi tenaga kerja yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik. Hal ini disebabkan karena dengan adanya standar upah yang tinggi, perusahaan lebih memilih seseorang yang terdidik dan memiliki pengalaman karena akan sebanding dengan apa yang telah perusahaan bayarkan (Wulandari & Woyanti, 2023).

Beberapa Ekonom mengatakan bahwa kurva permintaan tenaga kerja miring ke bawah dan kurva penawaran yang miring ke atas diakibatkan oleh kenaikan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan upah pasar. Peningkatan seperti ini, mengakibatkan banyak Pengusaha mengurangi tenaga kerja sehingga terjadi pengangguran (Yuliansyah, 2020). Setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Sebaliknya, apabila tingkat upah turun maka akan diikuti oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah. Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Sehubungan dengan itu, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran (Amiliya, 2019).

Upah minimum diduga kuat mempengaruhi kondisi pengangguran. Penetapan tingkat upah minimum memberikan implikasi terhadap fenomena tingkat pengangguran. Tingginya upah minimum yang ditetapkan mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja. Dengan pengertian sederhana, semakin tinggi tingkat upah minimum maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran (Pasuria & Triwahyuningtyas, 2022).

Salah satu Tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia adalah melihat Indeks pembangunan manusia. *The United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia

sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan (Mauliddiyah, 2021). Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Dengan Indeks Pembangunan Manusia dapat mengetahui penduduk yang bisa mengakses hasil dari pembangunan ekonomi yang meliputi pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain- lain (Lailatul Qamariyah et al., 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025 (data diolah)

Gambar 1.5 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten

Tahun 2019 - 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten menunjukkan tren peningkatan yang positif di 5 tahun terakhir di semua kabupaten/kota. Kabupaten Tangerang mencatat IPM tertinggi, meningkat dari 71,93 pada tahun 2019 menjadi 73,43 pada tahun 2023, mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Kota Tangerang juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan IPM naik dari 78,43 menjadi 79,46 dalam periode yang sama, menandakan pertumbuhan yang baik dalam aspek

pembangunan manusia. Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang mengalami pertumbuhan yang stabil, dengan IPM Lebak meningkat dari 63,88 pada tahun 2019 menjadi 65,21 pada tahun 2023, sedangkan Pandeglang dari 64,91 menjadi 66,42. Kota Cilegon dan Kota Serang juga mengalami kenaikan, dengan Cilegon mencapai 74,54 dan Serang 73,48 pada tahun 2023. Kota Tangerang Selatan, menunjukkan IPM yang tinggi dengan 82,28 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, peningkatan IPM di Banten mencerminkan keberhasilan dalam program-program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, serta menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IPM Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 mencapai level 72,72. Sejak tahun 2015, status pembangunan Banten berubah dari kategori “Sedang” ($60 < \text{IPM} < 70$) menjadi kategori “Tinggi” ($70 < \text{IPM} < 80$). Angka tersebut mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Provinsi Banten. Secara spasial di pulau Jawa, IPM Provinsi Banten pada tahun 2021 berada di posisi tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Secara nasional, IPM Provinsi Banten berada di posisi delapan dan selalu tercatat lebih tinggi dari angka nasional (Bank Indonesia Banten, 2022)

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran dijelaskan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk

mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dalam Mahroji & Nurkhasanah 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah. Menurut Hukum Okun (*Okun's Law*) bahwa melalui peningkatan produktivitas akibat peningkatan IPM akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan peluang dan permintaan tenaga kerja yang dapat menyerap masyarakat dan membantu mengurangi angka pengangguran (Palindangan & Bakar, 2021).

Penelitian- penelitian terdahulu masih membahas tentang faktor- faktor yang mempengaruhi pengangguran. Perbedaan hubungan yang terjadi pada penelitian terdahulu terkait dengan perbedaan kondisi daerah yang diteliti. (Nuzulaili, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Variabel PDRB positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Pulau Jawa Tahun 2017-2018. Namun sedikit berbeda dengan penelitian (Yuniar, 2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017-2020. Selain itu (Erlangga, 2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Namun sedikit berbeda dengan penelitian (Yoga et al., 2022) dalam penelitiannya

menjelaskan upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran dan menurut (Polii et al., 2023) menjelaskan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Pada penelitian ini, terdapat kesenjangan (*research gap*) antara hasil studi sebelumnya. Ketimpangan ini terlihat dari adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten dalam jurnal-jurnal sebelumnya yang membahas topik yang sama. Beberapa studi menghasilkan temuan yang berbeda, dengan beberapa menemukan hubungan positif antara variabel, sementara yang lain menemukan hubungan negatif atau tidak signifikan. Selain itu, dalam penelitian ini, kebaruan (*novelty*) terletak pada penggunaan kombinasi variabel seperti Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersamaan, yang belum pernah diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian ini akan fokus pada tahun-tahun terkini, di mana dinamika ekonomi dan sosial mengalami perubahan signifikan, sehingga diharapkan penggunaan ketiga variabel tersebut secara bersamaan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang berisikan fenomena yang telah dijelaskan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **"Analisis Determinan Pengangguran (Studi Kasus di Provinsi Banten Tahun 2014-2023)"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2014-2023
2. Bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia secara Bersama - sama terhadap pengangguran Provinsi Banten tahun 2014-2023

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2014 - 2023
2. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama – sama terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2014 – 2023

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk untuk menambah wawasan mengenai pengaruh pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2014-2023.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dan bagi para pemangku kebijakan dapat membuat kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Banten dan pengambilan data dari *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2024 diawali dengan pengajuan judul kepada jurusan Ekonomi Pembangunan. Adapun jadwal penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

Keterangan	2024																2025							
	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan Administrasi																								
Pengajuan Judul																								
Pengesahan Judul																								
Pengumpulan Data																								
Penyusunan UP dan Bimbingan Penelitian																								
Sidang Usulan Proposal																								
Revisi Proposal UP																								
Pengolahan Data dan Penyusunan Skripsi																								
Sidang Komprehensif																								
Revisi																								